

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, sangat penting untuk merancang dan menerapkan rezim akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dan efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk lebih meningkatkan implementasi pemerintahan yang lebih efisien, berhasil, bersih dan bertanggung jawab untuk melaporkan pemalsuan pemenuhan otoritas publik sebagai bentuk akuntabilitas di lembaga. Tanggung jawab dimaksudkan dalam bentuk laporan yang disajikan ke puncak, institusi, pengawasan dan tanggung jawab asesef, maka misi dan tujuan lembaga pemerintah dikembangkan sebagai bagian dari manifestasi tata pemerintahan yang baik dari tanggapan media dalam laporan dari kinerja instansi pemerintah (lakip).

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 tahun 1999 tentang tanggung jawab kegiatan implementasi negara. Keputusan Presiden menuntut bahwa setiap lembaga negara dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi utama dan wewenang untuk mengelola sumber daya berdasarkan tingkat strategis yang ditetapkan oleh Presiden sebagai manajer pemerintah. Laporan ini menjelaskan kegiatan lembaga pemerintah yang kompeten

melalui sistem tanggung jawab badan pemerintah (SAKIP). Referensi untuk setiap lembaga pemerintah ketika menyiapkan laporan tentang tanggung jawab Badan Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk laporan pemerintah . Panduan ini diharapkan dapat membantu persiapan rencana strategis dan rencana kinerja dan menerapkan sistem pengukuran kinerja sebagai bagian integral

Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil dari implementasi masalah pemerintahan regional yang diukur dengan input, proses, hasil, atau konsekuensi. Proses menyiapkan laporan tentang implementasi otoritas (Lakip) harus disebut sehingga ia dapat mencapai hasil yang lebih baik untuk masa depan, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang, beberapa hal harus diketahui selama proses penyusunan laporan akuntansi untuk kinerja lembaga pemerintah Biro Pendidikan Kota Padang, khususnya:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pada Tahun 2020?
2. Apa saja Kendala dalam Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari kegiatan penulisan tugas akhir ini penulis dapat mengambil tujuannya yaitu untuk :

1. Untuk mempelajari bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Pada Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan memahami dunia kerja.
 - b. Untuk memahami dunia kerja dengan lebih baik dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Instansi

Sebagai saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan langsung oleh penulis di Dinas Pendidikan Kota Padang yang menjadi subjek magang, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan praktek.

b. Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui Internet dibuat untuk menemukan pendukung, seperti peraturan-peraturan mengenai penyediaan akun kinerja lembaga pemerintah..

1.6 Metode Analisis Data

Dalam rangka membuat laporan magang, penulis juga mengadakan analisa mempertemukan antara teori-teori yang sudah penulis terima diperkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan seperti kinerja yang ada di Dinas Pendidikan Kota Padang.

1.7 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi menjadi lima bab di mana setiap bab terdiri dari subbab dari bab di mana kerangka masalah masalah dengan informasi berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, latar belakang menggambarkan perumusan masalah, magang dan keunggulan magang dan sistem sistem.

BAB II Landasan Teori

Bab ini dalam terdiri dari definisi laporan, tanggung jawab tanggung jawab, konsep kinerja, pengukuran kinerja, kinerja kinerja, pemahaman membaca

akun kinerja otoritas pemerintah, prinsip LAKIP, keunggulan LAKIP, Fungsi Lakip, Waktu pengiriman Lakip.

BAB III Gambaran Umum

Dalam bab ini yang terdiri dari tugas-tugas utama dan fungsi Kantor Pendidikan Kota Padang dan Misi, Tujuan dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Tugas Utama dan Fungsi Unit Organisasi Kota dan Fungsi Padang unit kantor gedung perkotaan.

BAB IV Pembahasan

Bab ini adalah diskusi tentang metode persiapan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintah di Kantor Pendidikan Kota Padang.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan proposal untuk menulis laporan yang dapat diperkenalkan untuk lembaga pemerintah, dan pihak tertarik pada masa depan.

